SETIAP WARGA NEGARA BERHAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA YANG HARMONIS

Cahyaning Dewanti¹, Riyan Hidayah²

¹²Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

cahyaningdewanti@gmail.com¹, Riyanhidayah25@gmail.com²

Dosen Pembimbing Dr. Timotius Haryono

Abstrak

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang, akan tetapi hal itu tidak luput dari timbulnya konflik yang bisa berakhir dengan perceraian. Perceraian bisa timbul karena beberapa sebab seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan akan timbulnya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia . Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan data yang diunggah oleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data yang diperoleh dari tahun 2015-2018 dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat ,hal ini sangat memprihatinkan sebab didukung dengan data kekerasan terhadap perempuan yang juga meningkat setiap tahunnya. Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian di Indonesia berhubungan erat dengan faktor meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang didukung dengan data – data yang ada.

Kata kunci : Hak Berkeluarga, Keluarga harmonis, konflik rumah tangga.

Abstract

Having a harmonious family is everyone's dream, but it does not escape the emergence of conflict that can end in divorce. Divorce can arise due to several reasons such as the existence of domestic violence related to the increasing cases of violence against women. The purpose of this study is to determine the tendency for divorce cases to occur in Indonesia. The method used for this research is qualitative research based on data uploaded by the Central Statistics Agency . From the data obtained from 2015-2018 it can be concluded that the divorce rate in Indonesia continues to increase, this is very alarming because it is supported by data on violence against women which also increases every year. From the results of this study it can also be concluded that divorce cases in Indonesia are closely related to the increasing factor of violence against women supported by available data.

Keywords: Family Rights, harmonious family, household conflict.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta

1. PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia yang dimana merupakan negara hukum serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama, semua warga negaranya harus mentaati aturan - aturan hukum yang berlaku dan menerapkannya di kehidupan sehari – hari sehingga membuat semua warga terbiasa akan aturan – aturan yang berlaku. Kewajiban dan peran sebagai warga negara salah satunya adalah hak sebagai warga negara Indonesia untuk membentuk keluarga yang harmonis. Sebagai warga Negara Indonesia seharusnya menjalankan hak dan kewajiban dengan baik karena setiap warga Negara berhak membentuk keluarga yang harmonis sebab peran keluarga merupakan pondasi awal berkembang dan tumbuhnya sebuah bangsa. tetapi semua itu tidak luput dari perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga akan terjadi di antara impian awal seseorang yang ingin membentuk sebuah keluarga yang harmonis (Rahayu, 2017).

Banyaknya berita mengenai perceraian di Televisi maupun di Internet yang berhubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diakibatkan oleh seseorang yang tidak

menepati kewajibannya.

Bertambahnya kasus perceraian di Indonesia semakin mengkhawatirkan apalagi didukung dengan adanya data kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat juga hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia . Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kasus perceraian di Indonesia saat ini. Dengan tingginya angka perceraian di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun maka penulis ingin mencari apa penyebab serta dampak dari perceraian di Indonesia. Dengan demikian pemerintah bisa mengerti tindakan apa yang perlu diambil untuk mengurangi masalah ini agar tidak meningkat angkanya, maka penulis memiliki harapan untuk menjadikan keluarga yang harmonis di setiap warga negara Indonesia itu bisa terwujud.

2. METODOLOGI PENELITIAN

a). Metode Kualitatif

metode dengan pengambilan data dari sumber tertentu dan terpercaya sebagai bahan untuk pembahasan

b). Metode Studi Kasus (Case Study)

pendekatan dengan menyelidiki serta memahami suatu masalah atau kejadian

dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang diolah agar mendapatkan solusi supaya masalah yang diungkap dapat dapat diselesaikan.

c). Studi Pustaka

Menemukan informasi berdasarkan pada berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan berbagai materi yang dapat membantu memaparkan informasi yang real.

3. PENJELASAN ISTILAH

a. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (Nurjannah, 2018).

b. KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain (Rofiah, 2017).

c. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menganiaya atau kekerasan fisik terhadap perempuan baik mental dan fisiknya (Puspita, 2017).

4. HASIL DAN TINJAUAN PUSTAKA

a. Hak Untuk Membentuk Keluarga

Perkawinan itu sendiri merupakan ikatan antara perempuan dan laki – laki yang menghubungkan antara dua keluarga atas dasar hukum dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling memiliki satu sama lain atas dasar cinta dan sayang serta untuk mencapai tujuan bersama tanpa adanya paksaan , penipuan atau tekanan dari pihak (Cleary, 2019) .

Dari penjelasan tentang perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai tujuan dan prinsip,yaitu Perkawinan bertujuan untuk membawa kebahagiaan serta hidup saling melengkapi satu sama lain, Perkawinan juga bukan hanya bersifat lahiriah tetapi juga bersifat batiniah dan keagamaan.Tercatat dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang berisi tentang perkawinan yang berlaku

untuk seluruh warga negara Indonesia dan Hak Membentuk Keluarga pada Pasal 28B ayat 1 (Michael, 2017) .

Pemerintahan Indonesia mempunyai program mewajibkan untuk pasangan yang ingin menikah harus mempunyai sertifikasi layak nikah (Sueri, 2017). Dengan adanya program ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pasangan pengantin ,membekali informasi tentang kesehatan fisik dan psikis ,serta memastikan apakah siap untuk berumah tangga serta bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat yang biasanya terjadi kekerasan di rumah tangga yang berakibat atau berimbas pada kondisi anak .

b. Tingginya kasus perceraian

Mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Namun faktanya tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan lancar yang berakhir untuk memutuskan bercerai. Berikut merupakan table perceraian di Indonesia dari tahun 2015-2018 :

Sumber

<http://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-memprihatinkan>

Terdapat dalam kurun waktu 2015-2017 tren perkara putusan (inkracht) mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, pada pengajuan cerai gugat (istri) dan cerai talak (suami) di 29 Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 tercatat sebanyak 394.246 perkara dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara. Sedangkan 2018 angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus perceraian yang meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 374.516 (Negara, 2020).

Berdasarkan hasil dari penelitian, Dari data tersebut jumlah intensi perceraian paling banyak pada pihak perempuan dibandingkan dengan laki – laki hal ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya didominasi oleh laki – laki. Seperti yang dilansir dari *Psychology Today*, Gad Saad,

PhD, seorang ilmuwan John Molson School of Business di Kanada, mengemukakan bahwa sebanyak 68,9% kasus perceraian diajukan oleh pihak perempuan setelah mengamati *jurnal American Law and Economics Review* dalam survei tahun 2000 mengenai kasus-kasus perceraian di Amerika Serikat (Khumas, 2015)

c. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan

Sumber :
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165>

Pada grafik kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2012-2015 dan turun pada tahun 2016 sebesar 259.150 kasus serta meningkat lagi pada tahun berikutnya dan pada tahun 2018 terdapat 406.178 kasus dan dari 13.568 laporan, mencakup keluarga (KDRT) dan hubungan pribadi seperti pacaran

memiliki risiko besar dengan jumlah kasus mencapai 71 persen atau 9.637 kasus (Anak, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian beragram spektrum dan kekerasan yang tercatat dalam CATAHU 2020 yaitu kekerasan terhadap perempuan yang meningkat hampir 8 kali lipat dalam kurun waktu 12 tahun (KOMNAS Perempuan, 2019). Hal ini sangat memprihatkan apalagi menyangkut tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih menjamin perlindungan terhadap perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini berhubungan erat dengan kasus perceraian yang dimana kasus kekerasan terhadap istri mencapai 49,6% dari total kasus KDRT . Dari data kasus itu dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih banyak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun misalnya kekerasan psikis, perselingkuhan dan kekerasan verbal sehingga mengajukan gugatan cerai yang membuat data kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat.

d. Hal yang menyebabkan perceraian di Indonesia meningkat

Hal yang sering diasosiasikan penyebab dari perceraian yaitu karena ketidakcocokan atau perselisihan antara kedua belah pihak dan memilih jalan untuk bercerai. Padahal dalam bercerai harus disepakati serta dalam pembagian harta dan hak anak dan masih banyak lagi yang harus dilakukan sehingga bercerai itu sebenarnya bukan hal yang mudah.

Ajeng Riviando, M.Psi selaku Psikolog mengatakan perceraian semakin meningkat sekitar 15-20%. Alasan utama yaitu ketidakharmonisan rumah tangga, kedua karena media sosial dan yang terakhir karena faktor ekonomi dan perselingkuhan serta dalam pola pikir merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi angka perceraian di Indonesia (Azizah, 2017) :

- Tidak menyalahkan satu sama lain, Dengan belajar lebih ikhlas dan menerima satu sama lain hubungan dengan pasangan akan jauh lebih jauh dari kata perceraian.
- Belajar untuk memaafkan, Hal seperti ini juga sangat penting dalam mempertahankan rumah tangga karena tidak ada orang yang akan menyuakai jika kesalahannya selalu

pasangan milenial saat ini menikah itu yang terpenting bahagia tanpa memikirkan jangka panjang. Media sosial berpengaruh karena berkaitan dengan *quality time* yang menyebabkan kurangnya interaksi dan berbagi pikiran tentang kehidupan rumah tangga (Matondang, 2014)

e. hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi perceraian di Indonesia

Semua keluarga pasti memiliki cita-cita ingin hidup harmonis dan hidup aman bersama dengan suami dan istri mereka, Namun didalam hidup pasti ada masalah dan masalah yang bisa dijumpai dalam keluarga adalah pertikaian. Berikut ini diungkit dan diingat setiap kali bertengkar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil makalah yang kami buat yaitu tentang "SETIAP WARGA NEGARA BERHAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA YANG HARMONIS" dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membentuk keluarga yang harmonis setiap warga negara harus bisa meminimalisir faktor-faktor yang dapat membuat perselisihan antara suami dan istri.

Selain dari dalam faktor yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan keluarga itu bisa datang dari luar, jadi untuk mencegah perceraian atau permasalahan dalam keluarga yang perlu dilakukan adalah saling berintrospeksi baik dari suami dan istri agar tercipta keluarga yang harmonis.

Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian di Indonesia berhubungan erat dengan faktor meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang didukung dengan data – data yang ada.

SARAN

Pemerintah harus menciptakan program yang dapat meminimalisir permasalahan yang timbul di keluarga

Perlu adanya sosialisai bagi masyarakat luas agar tidak melakukan pernikahan dini yang dapat menimbulkan percekocokan dalam keluarga

Tindakan yang menyalahi aturan seperti perjudian, dll itu harus dikurangi karena akan menimbulkan rasa kebencian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Anak, D. A. N. and Aceh, D. I. (2016) 'Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan', pp. 0–15.

Azizah, L. (2017) 'Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam', *AL-'ADALAH, Vol 10, No 4 (2012): Al-'Adalah, al*

-'adalah, Vol 10, No 4 (2012): Al-'Adalah, 0854-1272, , 2017.

Cleary, M. (2019) 'Pernikahan', *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Khumas, A., Prawitasari, J. E. and Retnowati, S. (2015) 'Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan', *Jurnal Psikologi*. doi: 10.22146/jpsi.9908.

KOMNAS Perempuan (2019) 'CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2018', *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Matondang, A. (2014) 'Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*.

Michael, T. (2017) 'ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *Mimbar Keadilan*. doi: 10.30996/mk.v0i0.2195.

Negara, S. B. and Hapsari, O. P. (2020) 'Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Memprihatinkan', pp. 1–5.

Nurjannah, S. and Kahija, Y. F. La (2018) 'Perceraian', *Jurnal Empati*.

Puspita Dewi, I. D. A. D. and Hartini, N. (2017)

'Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)', *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. doi: 10.20473/jpkm.v2i12017.51-62.

Rahayu, S. M. (2017) 'Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga', *Jurnal Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNl*.

Rofiah, N. (2017) 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam',

Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. doi: 10.15575/jw.v2i1.829.

Sueri, M. M. (2017) 'Kursus Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand)', *Kursus Calon Pengantin untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand)*.